PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INDUSTRI:
Pendidikan Elitis Dapat Memacu Daya Saing Di era Global

Makalah

PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
KELAS TERDAFTAR
JUDUL
NERALAN

Oleh
Hanif Al Kadri, S.Pd, M.Pd.

Drs. SUARMAN KARIM, M.Si
NIP 195604177198211 1 001

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG
DITERIMA TGL : 11-12-13
SUMBER/HARGA : Hd
KOLEKSI : Ki
No. INVENTARIS : 208/Hd/2013-P-1(1)
KLASIFIKASI :

JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2011

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga makalah ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Makalah yang penulis susun ini adalah sebuah makalah pendidikan tinggi sebagai industri; pendidikan elitis dapat memacu daya saing di era global.

Besar harapan penulis agar makalah ini memberikan manfaat yang cukup besar, baik untuk yang membaca khususnya bagi penulis sendiri, agar lebih memahami isi dan berbagai persoalan tentang topik yang dibahas dalam makalah ini. Sehingga pada akhirnya bermanfaat bagi penulis dan yang membaca tulisan ini betapa pentingnya makna pendidikan di era global ini khususnya pendidikan tinggi sebagai industri.

Akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang ikut membantu penulis dalam menyusun makalah ini dan penulis juga minta maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan terhadap pemahaman dan penjabaran makalah ini.

Padang, Februari 2011

BAB I
PENDAHULUAN

A. Rasional

Fungsi pendidikan dalam kehidupan dan dalam pembangunan bangsa adalah mencerdaskan seluruh potensi dan aspek kepribadian seseorang secara total dan dengan terus-menerus. Pendidikan dalam arti seperti ini melekat dengan proses kehidupan manusia sepanjang hayat. Manusia cerdas secara total amat diperlukan agar manusia memiliki kapasitas untuk memecahkan berbagai permasalahan kehidupannya secara sempurna. Cerdas haruslah diberi arti tumbuh, berkembang dan maju secara totalitas dan sempurna seiring dengan proses pertumbuhan manusia.

Pendidikan Tinggi memiliki fungsi membangun manusia agar memiliki kemampuan professional yang amat tinggi yang diperlukan untuk membangun kehidupan. Sebagai sebuah institusi, Pendidikan Tinggi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun peradaban manusia. Dalam kehidupan suatu bangsa dan Negara, Pendidikan Tinggi merupakan lambang kemajuan Negara tersebut.

Pendidikan Tinggi di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan rumit. Terbatasnya kesempatan kerja yang dapat menyerap lulusan Pendidikan Tinggi menyebabkan jumlah pengangguran lulusan Pendidikan Tinggi semakin menumpuk. Kesulitan pembiayaan yang dialami Pendidikan Tinggi menyebabkan Pendidikan Tinggi sulit berkembang menjadi Pendidikan Tinggi yang berkualitas. Lemahnya management dan terbatasnya infrastruktur Pendidikan Tinggi, lemahnya system pengendalian pemerintah terhadap pertumbuhan Pendidikan Tinggi yang menjamur di seluruh tanah air, menyebabkan kesulitan yang semakin besar dalam mengendalikan mutu Pendidikan Tinggi tersebut. Kurikulum, proses pembelajaran yang amat tradisional yang tidak memperhatikan perubahan yang terjadi pada lingkungan strategis, menyebabkan sulitnya Pendidikan Tinggi tersebut untuk maju dan berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Untuk membangun Pendidikan Tinggi yang berkualitas dan memiliki kapasitas menjawab tantangan masa depan, memacu daya saing di era global, pemahaman yang komprehensif tentang Pendidikan Tinggi secara cermat, merupakan titik berangkat yang diperlukan dalam upaya membangun Pendidikan Tinggi sebagai industry. Secara kuantitatif Pendidikan Tinggi di Indonesia cukup banyak, baik negeri maupun swasta. Namun secara kualitatif tingkat perkembangan setiap Pendidikan Tinggi tersebut berbeda, demikian pula dengan tingkat kualitasnya. Pendidikan Tinggi yang memenuhi standar sebagai Pendidikan Tinggi bermutu secara universal masih sedikit. Tantangan nasional dan global dan tantangan informasi teknologi, menjadikan Pendidikan Tinggi di Indonesia dalam kondisi permasalahan yang cukup kompleks, apalagi ditambah dengan ketergantungan yang amat kuat terhadap dana yang bersumber dari pemerintah atau sumber dana dari mahasiswa.

Secara filosofis, membangun sebuah Pendidikan Tinggi sebagai industry memerlukan landasan filosofis yang kokoh, memerlukan visi dan misi yang jelas dan strategis, tepat dan lugas serta didukung serta didukung oleh system management modern yang andal.

Di dalam makalah ini akan dikaji dalam berbagai perspektif tentang Pendidikan Tinggi Sebagai Industri: Pendidikan elitis dapat memacu daya saing di era global.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pandangan Pendidikan Tinggi Sebagai Sebuah Industri

Industri pendidikan mempunyai dua karakteristik yang membuatnya menjadi calon terbaik untuk studi efisiensi, yaitu ukuran dan kenaikan (bertambahnya) biaya. Pendidikan mewakili dari satu industri terbesar di negara dengan perkiraan total pengeluaran langsungnya sebesar kira-kira $108 Milyar di tahun 1974-75, mewakili sekitar 8% Gross National Product (Bell 1974). Sudah tentu, satu penjelasan yang mungkin untuk bertambahnya biaya ini adalah meningkatnya kualitas dalam output pendidikan. Peningkatan yang mendasar dalam sumber biaya tentu saja menimbulkan pertanyaan penting mengenai performance di sektor pendidikan. Dalam tanggapannya para ahli ekonomi mencurahkan perhatian mereka untuk mempelajari efisiensi internal dari sektor pendidikan, dan usaha awal mereka mengusulkan adanya dua cabang sifat di lingkungan kampus, yaitu optimisme dan pesimisme.

Orang-orang yang pesimis mengusulkan bahwa sifat dasar dari kegiatan seperti pendidikan, tidak dapat dielakkan lagi untuk mengarah ke biaya nyata yang lebih tinggi per unit output. William Baumol sudah menyusun analisanya dengan memandang pendidikan sebagai kegiatan yang 'tidak berkembang secara teknologi', dimana istilah ini diterapkan terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak dapat bermanfaat dari segi inovasinya, terkumpulnya modal, dan skala ekonomi yang lebih besar. Menurut Baumol juga, sifat intensif buruh dari pendidikan berakhir dengan sendirinya, sehingga kemungkinan pengganti buruh sebagai modal dibatasi sama sekali. Anggapan bahwa upah uang naik menurut meningkatnya produktivitas buruh dengan kemajuan industri secara teknologi, tapi peningkatan ini juga diikuti ketidak-majuan di sektor seperti pendidikan dalam bentuk biaya yang nyata per unit outputnya. Baumol menyimpulkan bahwa biaya yang nyata dari tingkat yang sama dari output untuk industri yang nonprogressive seperti pendidikan, akan meningkat untuk jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Catatan bahwa model Baumol ini tidak melihat kenaikkan

biaya karena ketidak-efisiensian, tapi lebih kepada kenaikkan yang tidak dapat dielakkan. Menurutnya, yang menjadi kata penghibur diri: "Jangan mengirim nasihat melulu, kirim ajalah uangnya..."

Namun demikian, karena para ahli ekonomi mempunyai kesukaan untuk membuktikan lebih baik nasihat daripada meningkatkan pembiayaan, sebagian besar ahli ekonomi yang prihatin pada sektor pendidikan mempunyai anggapan taktis bahwa produktivitas dalam pendidikan dapat diperbaiki. Mereka adalah orang-orang yang optimis. Mereka memandang pendekatan mereka sendiri akan mengarahkan ke efisiensi terbesar dalam pembiayaan pendidikan. Adam Smith dan Mill Friedman telah berusaha untuk menafsirkan fungsi produksi pendidikan yang dimasukkan dalam analisa baru-baru ini. Studi mereka sudah ditempatkan penilaian susunan produksinya, dengan harapan bahwa produk sedikit yang dihasilkan ini dapat dibandingkan dengan harga, untuk menghasilkan solusi biaya paling sedikit bagi produk pendidikan.

Fungsi Produksi Pendidikan.

Hasil (outcome) dari suatu pendidikan bagi seseorang ditentukan oleh kumulatif sejumlah penjelmaan 'modal' dalam diri individu melalui keluarganya, sekolahnya, komunitasnya dan kawan sebayanya sebaik karakeristik pembawaannya. Jumlah terbesar dan kualitas investasi dari masing sumber-sumber ini, lebih tinggi lagi akan menjadi output. Lebih khusus lagi, keluarga menyediakan kelengkapan materi, intelektual, dan emosional dari input yang ada dalam diri seorang anak, sekolahnya, kelompok sebayanya, media, dan lain sebagainya yang memberikan arus input setiap waktu sehingga meningkatlah perwujudan sumber daya manusia sebagai modal.

Rumusan pelaksanaannya merupakan kesalahan utama dalam persamaan dan variabel. Kebanyakan studi telah digunakan hanya pada ukuran output tunggal saja, yaitu angka uji pencapaian yang distandarisasi, meskipun kenyataannya sekolah-sekolah diharapkan untuk menghasilkan berbagai sikap dan keterampilan. Input keluarga dan latar belakang biasanya meliputi ukuran-ukuran kelas sosial seperti: pendidikan orang tua, kedudukan kepala keluarga, kepemilikan keluarga, struktur keluarga, ras dan jenis kelamin mahasiswa. Karakteristik sekolah

termasuk fasilitas seperti: perpustakaan, laboratorium, umur dan sifat bangunan, personil input dan sifat bawaan para guru seperti pengalaman, pendidikan, sikap dan kecerdasan verbal. Pengaruh kawan sebaya termasuk kelas sosial dan ciri rasial teman mahasiswa yang sebaya dan variabel tertentu yang tersisa. Kesukaran untuk mendapatkan ukuran yang valid dari karakteristik asli mempunyai maksud bahwa variabel telah diabaikan dari model ekonometrik. Pengabaian ini mungkin dihasilkan dalam penyimpangan dalam koefisien yang diukur dari variabel keluarga dan latar belakang.

1. **Beberapa konsep efisiensi. Efisiensi teknis dan alokatif dalam produksi** pendidikan: Efisiensi teknis mengacu pada pengaturan sumber-sumber yang tersedia dalam cara-cara untuk memaksimalkan kemungkinan keluaran/output yang dihasilkan. Sedangkan efisiensi alokatif atau efisiensi harga, mengacu pada penggunaan anggaran dalam cara-cara, yang pemberian harganya relatif, pengkombinasian sumber yang paling produktif yang dapat dihasilkan.
2. Efisiensi kesejahteraan sosial dalam produksi pendidikan. Penjelasan di atas mengabaikan analisa aspek efisiensi penting lainnya, yaitu efisiensi sosial secara keseluruhan. Sehinga bagaimanapun juga harus ada anggaran untuk memaksimalkan kesejateraan sosial. Karena bermacam output mungkin mempunyai nilai kecocokan yang berbeda untuk individu yang berbeda pula, maka dimngkinkan untuk mendapatkan susunan output sebagai input dalam memaksimalkan kesejateraan individu dan kesejahteraan sosial secara total.
3. Efisiensi dan skala. Tipe lain dari efisiensi adalah efisiensi ukuran, menyangkut besar dan kecilnya suatu perusahaan. Dalam berbagai macam ukuran sekolah yang besar baik secara individu atau wilayah, sangatlah memungkinkan untuk membuat skala hidup ekonomi dan bukan ekonomi. Pekerjaan empiris pernah dilakukan, tapi untuk menemukan yang betul-betul kualified malah memberikan kesalahan besar yang ditentukan dengan kurangnya struktur teori dan masalah pengukuran.

Asumsi-asumsi yang berhubungan dengan perilaku manusia dalam suatu perusahaan pendidikan

Mari kita membuat daftar dari beberapa kondisi secara eksplisit yang bersandar pada pengharapan keefisienan dalam sektor swasta. Walaupun katagori ini tidak eksklusif satu sama lain, tapi setiap penekanannya pada aspek penyampaiannya yang bersaing dapat diperiksa dengan teliti kemampuannya dalam menyampaikan pendidikan di sektor umum. Kedua katagori pertama mengacu pada pertimbangan keefisienan teknis, keda selanjutnya mengacu pada pertimbangan struktur dan inforamsi pasar, dan kedua terakhir mngacu pada keberadaan dan pandangan terhadap pengaturan insentif yang dihubungkan dengan apa yang dihasilkan perusahaan. Katagori dalam perkiraan industri mengenai keefisienan tersebut adalah:

1. Pengolahan pengetahuan mengenai proses produksi secara teknis.
2. Pengelolaan kebijaksanaan mendasar melalui percampuran input.
3. Lingkungan persaingan dasar dengan keseluruhan asumsi yang menyertainya (kebebasan masuk, banyaknya perusahaan, informasi yang sempurna).
4. Pengelolaan pengetahuan tentang harga input dan output.
5. Suatu fungsi objektif yang konsisten dengan memaksimalkan output, seperti memaksimalkan keuntungan, dan
6. Tanda keberhasilan atau kegagalan yang jelas (keuntungan, kerugian, penjualan, kenaikkan dan pengembalian, pembagian pasar).

Pertanyaan yang kita harapkan untuk bersikap adalah: Apakah kondisi yang sejajar ada dalam perusahaan-perusahaan umum seperti sekolah atau wilayah sekolah yang dapat menjamin perilaku efisien dalam memproduksi suatu pendidikan ? Sepertinya jawabannya akan berbunyi tidak. Sebenarnya untuk setiap keadaan yang ditentukan di atas, kemunculan sekolah ada pada akhir spektrum yang berlawanan dari yang disampaikan dalam pasar persaingan :

1. **Para pengelola pendidikan pada semua tingkat kekurangan pengetahuan** mengenai pengaturan produksi untuk mendapatkan hasil yang khusus.
2. Menejemen kebijakan yang mendasar tidak berada diatas input yang diperoleh dan bagaimana mereka mengaturnya dalam produksi pendidikan.

3. Hanya ada sedikit atau tidak sama sekali persaingan diantara sekolah.
4. Harga input dan output tidak secara siap tersedia untuk para pengelola pedidikan.
5. Susunan karakteristik insentif dan penghargaan di sekolah-sekolah kelihatannya mempunyai sedikit hubungan dengan tujuan-tujuan pendidikan yang dinyatakan pada lembaga-lembaga tersebut.
6. Tidak ada tanda keberhasilan atau kegagalan yang jelas di sekolah-sekolah yang dapat dibandingkan dengan penjualan, keuntungan, kerugian, angka pengembalian, atau pembagian pasar.

Pencapaian standarisasi sebagai output pendidikan.

Ini merupakan pertimbangan yang sangat serius, ketika kebanyakan studi tentang fungsi produksi pendidikan telah mengangap sekolah hanya memaksimalkan output tunggal saja, yaitu angka pencapaian pembelajaran mereka. Bahkan analisa-analisa ini mengakui bahwa sifat produk sekolah yang berganda ini, umumnya terbatas pada pertanyaan eksklusif mereka untuk menguji angka-angka. Dugaannya adalah bahwa kita sedikit mengetahui tentang sifat ukuran output lain yang dibandingkan dengan pemahaman kita, dan kemampuan untuk mengukur, keterampilan kognitif. Belum lagi output lain yang diabaikan dalam menafsirkan fungsi produksi pendidikan, yang akan menghasilkan sekumpulan bias (penyimpangan) tentang koefisienan produksi yang diukur, bahkan untuk pencapaian output, bila output lain tidak mengimbangi secara ketat pencapaiannya dalam proses produksi.

Bukti yang menyatakan bahwa sekolah tidak berusaha untuk memaksimalkan angka pencapaian, bahkan ketika pidato para petugas mereka menunjukkan ini sebagai tujuannya. Hal ini paling baik dilustrasikan oleh pengalaman dibawah Title I dari kegiatan pendidikan dasar dan menengah tahun 1965. Karena pada tahun 1965-'66, milyaran dolar sudah dialokasikan oleh pemerintah federal untuk pendidikan sekolah anak-anak yang berasal dari keluarga yang pendapatannya rendah. Dalam penerapan uang lokal wilayah sekolah, digunakan untuk menyatakan maksud-maksud dan rancangan program

Title I mereka. Sehingga kita dapat menganggap pasti bahwa tujuan-tujuan khusus sekolah dibawah program tersebut merupakan apa yang mereka nyatakan, dan kita dapat fokus pada hasil tersebut. Karena kebanyakan program dikonsentrasikan pada keterampilan membaca, maka sangatlah bermanfaat untuk mengevaluasi pengaruh pembiayaan Title I pada hasilnya. Dalam mengevaluasi tahun 1966-67 dan 1967-68 saya menemukan program-program membaca, dan Kantor Pendidikan US menemukan dasar angka uji membaca : "Anak yang berpartisipasi dalam proyek Title I mempunyai hanya 19% kesempatan tambahan pencapaian yang signifikan, 13% hilangnya kesempatan pencapaian yang signifikan, dan 68% kesempatan yang tidak berubah sama sekali". Selanjutnya proyek-proyek yang termasuk dalam penyelidikan sebagian besar merupakan wakil dari proyek yang investasi sumbernya diatas rata-rata. Oleh karena itu pencapaian tambahan (keuntungan) yang lebih signifikan akan didapatkan disini, ketimbang sampel yang mewakili proyek Title I. Ketidak-mampuan ini muncul menjadi seperti wabah. Diantara ribuan pengevaluasian proyek Title I, Kantor Pendidikan US memilih 1000 maksud-maksud yang sebagian besar menjanjikan penelitian yang cermat memalui k ontraktor penelitian yang berdiri sendiri. Dari semua ini, hanya 21 yang terlihat memperlihatkan bukti yang cukup mengenai pencapaian tambahan mahasiswa yang signifikan, baik dalam bahasa maupun keterampilan angka.

Analisa yang lebih berwawasan tentang hubungan antara produksi pendidikan dengan keberhasilan pasar buruh terlihat direfleksikan dalam pekerjaan terbarunya Bowles (1972) dan Gintis (1971). Dalam studi ini menggambarkan bahwa usulan sekolah yang prinsipil adalah untuk menghasilkan hubungan sosial dari produksi dan angka pencapaiannya hanya merupakan satu komponen dari hirarki produktif. Analisa ini juga mengusulkan bahwa pencapaian pendidikan hanya satu dari banyak output persekolahan, dan tidak perlu dijadikan sesuatu yang penting.

Dalam rangka mengukur fungsi produksi untuk pencapaian pendidikan, kita harus menganggap bahwa semua sekolah melaksanakan batasan produksi karena output ini, sehingga mengamati hubungan yang mewakili output

maksimum dapat dihasilkan dengan input yang sedang digunakan. Kenyataan bahwa sekolah-sekolah sedang memproduksi output lain disamping pemcapaian kognitif, meningkatkan pertanyaan serius tentang asumsi ini, karena itu beralasan untuk mempercayai bahwa produksi output lain menurunkan jumlah pembelajaran kognitif yang akan dihasilkan. Dalam kasus ini, jelaslah bahwa penafsiran statistik diantara keberadaan sekolah-sekolah yang hanya mempertimbangkan pencapaian angka mahasiswa yang dihasilkan, tidak akan memberikan kita perkiraan pembatasan produksi, karena pencapaian dapat lebih diperoleh melalui penurunan tingkat keseluruhan output yang tidak saling melengkapi hingga zero (nol).

Sayangnya, diabaikannya keseluruhan output sekolah secara konseptual, ukuran-ukuran mereka, dan hubungan struktural mereka untuk yang lainnya dan untuk input, membatasi kemampuan kita untuk memasukkan output-output yang tidak tercapai ke dalam analisis. Hasil dari keterbatasan-keterbatasan ini hampir ada di setiap studi, yang berusaha untuk menafsirkan fungsi produksi pendidikan dan yang mempunyai pertimbangan bahwa pencapaian pendidikan hanya sebagai sebuah output.

Ketidak-efisienen teknis dalam menghasilkan pencapaian mahasiswa dan implikasinya terhadap evaluasi.

Disana tidak ada rekan imbangan di dalam lingkungan persaingan suatu perusahaan yang akan merangsang pencapaian suatu industri. Bahkan bila sekolah berusaha untuk memaksimalkan pencapaiannya, usahanya akan dibatasi oleh ketidak-sempurnaan pengetahuan dan keterbatasan keleluasaan para menejer sekolah. Lebih lagi, output lain besaing dengan pencapaian sumber-sumber sekolah. Kemudian, usaha-usaha untuk mengukur fungsi produksi pendidikan yang menggunakan pencapaian sebagai output didasarkan pada asumsi 'tau sama tau' bahwa : sekolah memproduksi sebanyak mungkin pencapaian yang dapat diperoleh dengan sumber-sumber mereka. Oleh sebab itu mereka memproduksi batasan 'pencapaian'. Walaupun kemungkinan inefisiensi teknisnya cenderung tinggi, tapi pengukuran fungsi produksi pada output ini sepertinya menghasilkan koefisien yang berat sebelah dan implikasi yang menyesatkan.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Pengaruh efisiensi dari suatu pengukuran.

Bila kita mengukur hanya pada fungsi produksi rata-rata atau hanya pada fungsi produksi yang dibatasi, apakah ratio optimal dari input-input yang diperoleh dari satu ukuran dapat juga diterapkan untuk yang lainnya? Jawaban dari pertanyaan ini jelas bergantung pada apakah ada perbedaan dalam susunan parameter yang dihubungkan dengan masing-masing input. Sebagai contoh, mungkin saja inefisiensi dari sekolah-sekolah yang tidak dibatasi adalah netral/murni diantara input-input, sehingga setiap tingkatan input dan setiap kombinasi dari input ratio produk marginal adalah identik untuk fungsi yang dibatasi maupun fungsi rata-rata.

Kecenderungan inefisiensi teknis dalam memproduksi pendidikan, seperti ke-inefisiensi-an yang tidak murni diantara input-input. Oleh sebab itu, sekolah yang inefisiensi diorganisasi dengan cara yang inefisiensinya relatif dalam menggunakan satu input mungkin lebih besar inefisiensiannya dibanding yang lain.

Sekarang menjadi jelas, bahwa didalam kondisi-kondisi yang beralasan, nasihat para ahli ekonomi dalam menggunakan pendekatan ekonometri untuk mengukur fungsi produksi, sebenarnya dapat mengacu pada pernyataan yang 'dapat menurunkan alokasi efisiensi di sektor pendidikan'. Bahkan dengan penetapan harga yang sama, bila setiap perusahaan mempunyai penetapan produk marginal yang berbeda dimana tingkat faktor pengganti marginalnya berbeda dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, maka peraturan keputusan pada kombinasi input yang optimal di sektor pendidikan akan mempunyai kemungkinan yang tinggi untuk memproduksi peningkatan dalam mengalokasikan efisiensi. Prospek ini menjadi lebih jelas bila kita menggambarkan sebuah industri yang tersusun dari tiga perusahaan, Z1, Z2, Z3. Bila kita mengasumsikan bahwa setiap perusahaan melaksanakan sendiri 'fungsi produksi'nya, maka kita dapat menggambarkan unit produk secara individu 'isoquants' untuk setiap perusahaan.. Setiap perusahaan menghasilkan tingkat pencapaian output yang sama, walaupun pemetaan faktor kombinasinya mungkin berbeda.

Memperkenalkan inefisiensi-inefisiensi selanjutnya dalam produksi pendidikan

Singkatnya, dengan mempercayai dan implementasi hasil dari evaluasi industri, industri menjadi kurang efisien daripada efisiennya. Belum lagi, tehnik-tehnik evaluasi yang didasarkan pada penggunaan alat-alat bantu dari analisa ekonomi yang sangat canggih. Tidak ada pengukuran tunggal dari fungsi pencapaian dari produksi ekonomi akan memecahkan masalah ini. Oleh karenanya, faktor proporsi optimal akan bermacam-macam dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dan pengadopsian yang sama untuk industri akan menurunkan keseluruhan alokasi efisiensi. Bahkan analisa ini mengasumsikan bahwa tidak akan ada kesalahan dalam mengukur relationship, dan bahwa harga yang relatif sama dapat diterapkan untuk setiap perusahaan. Kenyataannya tidak ada dari asumsi-asumsi ini dengan valid menunjang argumentasi selanjutnya, yaitu: bahwa pernyataan efisiensi yang didasarkan pada fungsi produksi secara statistik dari pencapaian mahasiswa untuk industri pendidikan, dapat lebih membahayakan ketimbang bermanfaat di sektor efisiensi.

Menjadi suatu beban pemikiran bahwa saat ini kita tidak dapat mengidentifikasi atau mengukur sebagian besar output pendidikan, dan kita dengan kecewa mengabaikan spesifikasi dan pengukuran susunan input yang tepat. Selanjutnya, karena bagian yang terbesar dari anggaran sekolah dihabiskan pada personil, maka satu yang paling menimbulkan pertanyaan apakah 'harga' guru adalah sama untuk setiap sekolah atau wilayah sekolah? Untuk tingkat gaji guru yang sama, para guru lebih memilih bekerja dalam sekolah yang diikuti oleh anak-anak muda kelas menengah, dan di daerah pinggir perkotaan, dibandingkan di sekolah yang diikuti oleh anak-anak muda minoritas, di kelas ekonomi yang lebih rendah, dan di daerah pedesaan atau di daerah yang sudah benar-benar kota. Satu yang dapat diharapkan di sini adalah bahwa pilihan-pilihan guru yang relatif terhadap sekolah tertentu direfleksikan dalam gaji/ penghasilan wajib untuk memperoleh guru-guru di sekolah tertentu.

Sudah tentu, adalah hal yang memungkinkan bahwa masalah yang serupa dan serius timbul dalam menganalisa industri sektor swasta, kemudian

meninggalkan studi-studi ini dengan kesimpulan yang keliru. Belum lagi adanya perbedaan kuantum dalam pengaruh dari penemuan kasus yang salah, dibandingkan dengan penemuan di dalam pengevaluasian industri pendidikan. Perbedaan yang utama adalah perusahaan-perusahaan swasta akan cenderung memutuskan kombinasi input mereka yang didasarkan lebih kepada cara mereka menghadapi situasi khususnya, dibandingkan pada 'hasil' rata-rata industrinya. Selanjutnya, tingkat kesatuan perusahaan yang lebih tinggi, yang hasilnya tidak berguna, akan muncul dari pimpinan yang secara layak dia.

B. Kebijakan Otonomi Pendidikan Tinggi

Otonomi Pendidikan Tinggi diawali pada tahun 1999, ketika pemerintah Indonesia mensahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 untuk memfasilitasi rencana perubahan universitas negeri menjadi universitas yang otonomi atau Universitas Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Otonomi perguruan tinggi ditujukan antara lain untuk: (a) percepatan pengembangan institusi. Hal ini disebabkan terdapat perbedaan kemampuan masing-masing institusi tanpa harus tergantung satu dengan lainnya, (b) akuntabilitas, (c) transparansi, dan (d) efisiensi. Pendidikan Tinggi. Empat Universitas Negeri terbesar, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung menjadi pionir perubahan.

Pada bulan Desember 2000, ke empat universitas tersebut berubah status secara sah menjadi badan hukum atau Universitas BHMN melalui Peraturan Pemerintah nomor 152/2000, 153/2000, 154/2000, dan 155/2000. Setelah berubah status menjadi BHMN, metode keuangan dari pemerintah berubah. Anggaran tradisional yang sebelumnya berupa metoda komponen pembiayaan untuk biaya operasional telah diganti dengan hibah berdasarkan kinerja mereka (*block grant*). Sedangkan anggaran investasi didukung oleh pemerintah melalui persaingan terbuka atau hibah kompetitif.

Selanjutnya tiga universitas lainnya juga menyusul berubah menjadi BHMN yaitu: Universitas Sumatera Utara (2003), Univesitas Pendidikan Indonesia (2004) dan Universitas Airlangga (2006).

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Dalam rangka melanjutkan kebijakan otonomi Pendidikan Tinggi, pada tahun 2009 pemerintah kembali menerbitkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang "Badan Hukum Pendidikan yang dimaksudkan untuk mengisi kesenjangan peraturan dan memberikan landasan hukum kepada sektor pendidikan untuk secara menyeluruhan menjadi lembaga pendidikan yang otonomi. Peraturan yang disahkan pada Januari 2009 tersebut secara luas dikenal sebagai "UU BHP". Secara keseluruhan bertujuan untuk menyediakan dasar hukum untuk mempromosikan "otonomi manajemen pendidikan pada institusi formal" di tingkat pendidikan dasar, sekunder, dan tinggi. Meskipun untuk sekolah dasar wajib. Undang-undang tersebut selanjutnya menetapkan bahwa sekolah dasar dan menengah yang memiliki nilai akreditasi "A" dan didirikan oleh pemerintah pusat atau daerah, bersama-sama semua lembaga Pendidikan Tinggi negeri dapat segera menjadi badan hukum (Pasal 8). Peraturan tersebut lebih lanjut menetapkan struktur manajemen dan penataan aset manajemen yang diperlukan oleh setiap entitas lembaga pendidikan.

UU BHP, bagaimanapun juga, mensyaratkan agar pendidikan disediakan oleh entitas nirlaba, yang tampaknya menghalangi komersialisasi, untuk investasi yang menguntungkan di Pendidikan Tinggi. Entitas hukum pendidikan swasta dapat didirikan oleh Yayasan swasta. Namun, garis kepemilikan tampaknya menjadi kabur: apakah dana tersebut "hadiah" atau investasi (yaitu apakah investasi itu harus dikembalikan ketika entitas dibubarkan) masih kurang jelas. Selain itu, pelaksanaan aturan BHP harus ditata secara jelas agar sejalan dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2009 tentang Investasi Pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, yang memungkinkan investasi asing masuk dalam bidang pendidikan melalui perseroan terbatas dengan plafon ekuitas 49 persen.

Selain itu, Undang-undang BHP memiliki kerangka rincian pendanaan untuk sebuah "Badan Hukum Pendidikan". Salah satu bab kunci (Bab IV) di UU tersebut adalah pengaturan pembiayaan badan hukum. Hal ini menyatakan bahwa "sumber dana untuk pelayanan pendidikan formal yang diberikan oleh badan hukum pendidikan harus ditetapkan dengan mempertimbangkan konsep kesetaraan, kecukupan dan prinsip-prinsip keberlanjutan"; dan "pendanaan

pendidikan formal yang diselenggarakan oleh badan hukum pendidikan berada di bawah tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku ". Terkait Pendidikan Tinggi, ditetapkan bahwa "Pemerintah, bersama-sama dengan Badan Pendidikan Pemerintah, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah, menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa dan bantuan pendidikan BHPP "dan Pemerintah bersama-sama dengan BHPP harus menanggung minimal ½ (setengah) dari operasional BHPP dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi berdasarkan standar pelayanan minimum". Lebih lanjut peraturan tersebut menjelaskan bahwa biaya per mahasiswa harus sesuai dengan tetapi tidak melebihi 1/3 dari biaya operasional keseluruhan (Pasal 41). UU ini juga mensyaratkan 20% mahasiswa berpenghasilan termiskin berhak untuk menerima beasiswa Pemerintah (Pasal 46). Pendekatan yang sangat preskriptif ini tampaknya bertentangan dengan maksud asli peraturan tersebut dalam hal memfasilitasi otonomi kelembagaan. Namun, dengan jelas melegalkan Pemerintah untuk terus mendanai lembaga-lembaga otonomi yang tidak diizinkan oleh undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Setelah diterbitkannya Undang-undang ini, semua lembaga pendidikan mulai mempersiapkan diri agar dapat ditetapkan menjadi BHP. Bahkan lembaga donor seperti Bank Dunia dan ADB ikut serta mendukung kebijakan pemerintah ini melalui berbagai kegiatan persiapan lembaga Pendidikan Tinggi. Namun sementara kegiatan persiapan menuju otonomi sedang belangsung, tiba-tiba pada tanggal 31 Maret 2010, permohonan judicial review terhadap UU BHP dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian memutuskan untuk mencabut UU tersebut. Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Peraturan Pemerintah tentang BHP tidak selaras dengan amanah UUD 1945 dan menciptakan ketidak pastian hukum. Lebih lanjut, putusan yang dibuat oleh 9 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menjelaskan 5 alasan sebagai dasar pertimbangan pembatalan BHP:

(1) UU BHP memiliki banyak kekurangan dalam hal kejelasan yuridis, obyektif, dan keselarasan dengan hukum lain yang sudah ada;

(2) UU BHP mengasumsikan bahwa lembaga pendidikan memiliki manajemen dan kapasitas pembiayaan yang sama, yang sebenarnya tidak terjadi di Indonesia;

(3) Pemberian otonomi kepada lembaga-lembaga pendidikan akan mengarah pada terjadinya kekurangan dana pada banyak institusi, dan berpengaruh negatif terhadap pendidikan;

(4) UU BHP tidak menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional, dan hal itu bertentangan dengan komitmen UUD 1945; dan

(5) Prinsip non-for-profit untuk lembaga pendidikan dapat diterapkan dalam bentuk hukum lainnya, tidak harus dalam bentuk BHP.

Selanjutnya dalam rangka mengisi kekosongan hukum tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi karena dicabutnya Undang-undang tentang BHP dan sementara menunggu terbitnya undang-undang baru sebagai penggantinya, maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum, yang kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Pada saat yang bersamaan dipersiapkan undang-undang yang telah menyempurnakan masukan-masukan dari pertimbangan keputusan Mahkamah Konstitusi, sampai kemudian pada tanggal 10 Agustus 2012 Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dimana pada pasal 65 diatur mengenai Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum Pendidikan.

Pada hakekatnya ide Undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan adalah untuk memperkuat otonomi perguruan tinggi di Indonesia. **Strategi pertama** adalah memberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi untuk berkreasi dan bertindak secara mandiri dan tidak lagi terikat pada birokrasi pemerintah pusat yang tersentralisasi. **Strategi kedua** adalah mendorong pemberdayaan perguruan tinggi agar tidak lagi "cengeng" dengan sepenuhnya bergantung kepada pemerintah. Jadi ada upaya untuk secara inovatif mengembangkan diri sebagai *entrepreneur* (Bustami Rahman, 2003).

Mengapa perlu Badan Hukum Pendidikan?

Pada pasal 1 butir 1 diuraikan arti Badan Hukum Pendidikan sebagai badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan formal (UURI, 2009) dengan tujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan otonomi perguruan tinggi pada jenjang Pendidikan Tinggi Pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah mengapa Pendidikan Tinggi perlu diatur oleh UURI tentang Badan Hukum Pendidikan. Dasar hukum untuk menjawab pertanyaan ini terdapat pada pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Peendidikan Nasional yang menyatakan:

1) penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
2) badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
3) <u>Ketentuan Tentang Badan Hukum Pendidikan diatur dengan Undang-Undang</u>

Namun dikarenakan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka amanah pasal 53 ayat 3 tersebut selanjutnya diakomodasi pada ayat 65 dan 66 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu (pasal 65). Sedangkan pasal 66 ayat 2 menyatakan "Statuta PTN Badan Hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

208 / H/2013 - P.1 (1)

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

Dasar Hukum:

a. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum.
d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (permendiknas) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Mekanisme pendirian BHP, perubahan BHMN atau PT, dan pengakuan penyelenggara PT sebagai BHP.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
f. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Manfaat Undang-undang tentang BHP/ Pendidikan Tinggi

Dalam sosialisasinya, Dikti memaparkan mengenai manfaat adanya Undang-undang tentang perguruan tinggi sebagai berikut:

Masyarakat

- ✓ Memiliki banyak pilohan jenis Pendidikan Tinggi yang setara.
- ✓ Jaminan dapat kuliah sesuai dengan kemampuan akademiknya.
- ✓ Biaya kuliah yang dikendalikan, sehingga terjangkau.
- ✓ Jaminan memperoleh layanan pendidikan bermutu.

- **Dunia Usaha**
  - ✓ Memanfaatkan penelitian di perguruan tinggi untuk inovasinya.
  - ✓ Memperoleh insentif bagi yang memberikan bantuan ke Pendidikan Tinggi.

Perguruan Tinggi

- ✓ Jaminan terhadap otonomi akademiknya.
- ✓ Memiliki fleksibilitas dalampengelolaan sumber daya untukmeningkatkan mutunya.

- ✓ Memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah melalui bantuan operasional Pendidikan Tinggi.

- **Pemerintah**
  - ✓ Dapat mendorong perguruan tinggi untuk memajukan iptek melalui pelaksanaan Tridharma secara komprehensif dan terpadu.
  - ✓ Dapat memberikan layanan Pendidikan Tinggi yang berkesetaraan.
- **Dosen**
  - ✓ Jaminan memperoleh dana penelitian.
  - ✓ Kesetaraan dalam jenjang karir akademik.

Satu stakeholder Pendidikan Tinggi yang juga akan memperoleh manfaat adalah para peserta belajar. Manfaat terhadap adanya jaminan untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas selama masa belajar, serta kesempatan untuk memperoleh pengalaman mengimplementasikan hasil belajarnya melalui pemanfaatan kerjasama yang digalang oleh perguruan tinggi tempat yangbersangkutan belajar dengan dunia industry.

BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Pendidikan Sebagai Sebuah Industri

Ukuran dan keanikan bertambahnya biaya, optimism dan pesimis. Pendidikan sebagai sesuatu yang tidak berkembang secara teknologi (Boumel). Meningkatkannya biaya untuk produktivitas meningkat dalam jangka waktu yang lama. Jangan mengirimi nasihat kirimlah uangnya. Fungsi produksi pendidikan; Hasil (outcome) dari suatu pendidikan bagi seseorang ditentukan oleh kumulatif sejumlah penjelmaan 'modal' dalam diri individu melalui keluarganya, sekolahnya, komunitasnya dan kawan sebayanya sebaik karakeristik pembawaannya. Input keluarga dan latar belakang biasanya meliputi ukuran-ukuran kelas sosial seperti: pendidikan orang tua, kedudukan kepala keluarga, kepemilikan keluarga, struktur keluarga, ras dan jenis kelamin murid. Karakteristik sekolah termasuk fasilitas seperti: perpustakaan, laboratorium, umur dan sifat bangunan, personil input dan sifat bawaan para guru seperti pengalaman, pendidikan, sikap dan kecerdasan verbal. Pengaruh kawan sebaya termasuk kelas sosial dan ciri rasial teman murid yang sebaya dan variabel tertentu yang tersisa.

Katagori dalam perkiraan industri mengenai efisiensi adalah :

a. Pengolahan pengetahuan mengenai proses produksi secara teknis.
b. Pengelolaan kebijaksanaan mendasar melalui percampuran input.
c. Lingkungan persaingan dasar dengan keseluruhan asumsi yang menyertainya (kebebasan masuk, banyaknya perusahaan, informasi yang sempurna).
d. Pengelolaan pengetahuan tentang harga input dan output.
e. Suatu fungsi objektif yang konsisten dengan memaksimalkan output, seperti memaksimalkan keuntungan, dan
f. Tanda keberhasilan atau kegagalan yang jelas (keuntungan, kerugian, penjualan, kenaikkan dan pengembalian, pembagian pasar).

2. Kebijakan Otonomi Pendidikan Tinggi

Kebijakan otonomi pendidikan yang dirancang pemerintah dan diwujudkan melalui UU BHP ini seyogiayanya akan mengantarkan setiap penyelenggara pendidikan pada persaingan yang tinggi. Solusi dalam memenangkan persaingan tersebut adalah orientasi mutu pada setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan sehingga produk yang ditawarkan oleh lembaga tetap diminati oleh semua pemangku kepentingan. Kebijakan yang memiliki tujuan yang baik, ternyata pada awal pelaksanaannya telah mendapat tantangan yang antara lain dapat disebabkan oleh proses analisa dan implementasi kebijakan yang kurang lengkap atau kurang sempurna. Fokus kebijakan memang diarahkan kepada solusi bagi kemandirian manajemen pendidikan (termasuk Pendidikan Tinggi), namun dampak terhadap mahasiswa sepertinya kurang dipertimbangkan. Konflik terhadap implementasi kebijakan ini muncul manakala masyarakat 'dibebani' biaya kuliah yang cukup mahal bila dibandingkan dengan sebelumnya serta dibandingkan dengan penghasilan rata-rata masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

Suryadi, Ace. 2012. ***Pendidikan, Investasi SDM dan Pembangunan.*** Bandung: Widya Aksara Press

Suryadi, Ace. 2009. ***Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional:Konsep, Teori dan Aplikasi.*** Bandung: Widya Aksara Press

Suryadi, Ace. 2009. ***Mewujudkan Masyarakat Pembelajar: Konsep, Kebijakan dan Implementasi***. Bandung: Widya Aksara Press

Cohn, Elchanan. 1979. ***THE ECONOMICS OF EDUCATION***, University of South Carolina (Revised Edition), Ballinger Publishing Company, Cambrige Massachusetts, A Subsidiary of Harper and Row, Publishers, Inc

Carolyn Campbell and Christina Rozsnyai, (2002), ***Quality Assurance and the Development of Course Programmes,*** Paper on Higher Education, Bucharest, UNESCO.

Clark, B. R. (1998). ***Creating entrepreneurial universities***. Oxford, Pergamon.

Etzkowitz, H. (2004). ***The evolution of the entrepreneurial university. International Journal of Technology and Globalization***, *1*(1), 64-77.

Etzkowitz, H. (2006). ***Triple Helix twins: innovation and sustainability***. *Science and Public Policy*, *33*(1), 77-83.

Gibb, A., Haskins, G., & Robertson, I. (2009). ***Leading the entrepreneurial university: Meeting the entrepreneurial development needs of higher education institutions.*** Said Business School, University of Oxford.

Gibb, A.A. (2005) ***'Towards the Entrepreneurial University. Entrepreneurship Education as a lever for change'***. NCGE Policy paper series www.ncge.org.uk.

Gibb, A.A. (2006) ***'Entrepreneurship. Unique Solutions for Unique Environments. Can this be achieved with the existing paradigm?'*** Paper as background to Plenary presentation ICSB World Conference Melbourne Australia June 2006 (conference website).

Higher Education and Training Award Council, 2011, ***Enterprise and Entrepreneurship Education,*** (http://www.hea.ie/files/files/DES_Higher_Ed_Main_Report.pdf).

Joachim von Amsberg, Emmanuel Jimenez, Eduardo Velez, Mae Chu Chang, and Dandan Chen, (2010), ***Indonesia: Higher Education Financing Human Development, East Asia and Pacific Region,*** World Bank.

Nelles Jen dan Tim Vorley, (2008), ***Entrepreneurship and innovation – Organization Institutions, System and Regions,*** CBS,Denmark.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 ***tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum.***

Porter Michael E, (1998), T***he competitive Advantage of the Nation, London: MacMillan.***

Nugroho Riant, 2008, ***Public Policy***, Jakarta, Elex Media Komputindo.

Schwab Klaus, (2009), ***The Global Competitive Report,*** World Economic Forum, Genewa, Switzerland.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 ***tentang Perguruan Tinggi***.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 ***tentang Badan Hukum Pendidikan***.

World Bank, (2010), ***Indonesia: Higher Education Financing Human Development,*** East Asia and Pacific Region.

WTO, (2009), ***The WTO and the University: Globalization, GATS, and the American Higher Education.***

Daryanto, M, 1998, ***Administrasi Pendidikan***, Jakarta, Rineka Cipta.

Sutisna, Oteng, 1993, ***Administrasi Pendidikan Dasar Teoritis dan Praktis Profesional,*** Bandung, Angkasa.

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG